

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Aziz Pastikan Sekolah Swasta Gratis 2025

Gambir, Warta Kota

Komisi E DPRD DKI Jakarta menginginkan, kebijakan sekolah gratis yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru pada Juni 2025 bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu.

Namun tak semua sekolah swasta nantinya gratis, karena beberapa sekolah swasta yang dikategorikan menengah ke atas dipastikan tidak akan mendapat bantuan.

"Jadi yang akan kami gratiskan hanya untuk sekolah menengah ke bawah, yang mana di situ banyak sekali orang-orang yang masih

menunggak pembayaran," kata Abdul Aziz Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Minggu (3/11/2024).

Aziz mengatakan, program sekolah swasta gratis diyakini bisa menuntaskan berbagai persoalan di dunia pendidikan. Salah satunya yakni persoalan ijazah tertahan karena tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah.

"Sampai sejauh ini, orang yang sudah lulus ini masih belum bayaran beberapa bulan, bahkan lebih dari setahun, ijazah jadinya tertahan. Ini yang harus kita bereskan," tutur Aziz.

Dengan program sekolah swasta

gratis, ia ingin perekonomian masyarakat perlahan bisa meningkat.

Soalnya peluang kerja bagi pelajar lulusan SMA/SMK jadi lebih besar karena telah selesai menuntaskan pendidikan serta memiliki ijazah.

"Terutama dengan adanya pendidikan gratis, kita berharap tidak ada lagi permasalahan. Mudah-mudahan bisa berdampak terhadap perekonomian rakyat kecil yang selama ini pengeluarannya cukup banyak untuk pendidikan agar bisa di gratiskan," pungkasnya.

Pasti dialokasikan

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan

DPRD DKI Jakarta memastikan alokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tidak dihapus dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

Kabar penghapusan KJP ini sempat terkuak di tengah rencana program sekolah swasta gratis yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu sudah menekan nota kesepahaman atau MoU terkait

rencana kebijakan sekolah swasta gratis.

Rencana ini berdasarkan hasil kajian dan pembahasan selama lima tahun oleh anggota dewan periode sebelumnya.

"Di dalam sekolah gratis itu ada tambahan biaya yaitu untuk seragam dan keperluan sekolah. Tambahan ini yang akan dijadikan tetap KJP," ujar Baco dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (1/11/2024) petang.

Rapat itu menggagendakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU rancangan

kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin ini juga dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan jajarannya.

"Saya perlu terangkan kepada teman-teman karena belum tentu semuanya paham yang ada di Komisi E. KJP selama ini bermasalah terus, tidak adil, tidak merata dan tidak tepat sasaran," ucap Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini. (faf)